

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai fokus dan subfokus penelitian terkait diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemekaran Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik telah terlaksana dengan efektif. Hal ini didukung dengan pemahaman program terkait pelayanan publik yang telah dipahami dengan cukup baik, ketepatan sasaran pada pelayanan yang sudah tepat, ketepatan waktu pelayanan yang sudah tepat, tercapainya tujuan yang telah berjalan sebagaimana mestinya, serta perubahan nyata pada pelayanan yang terlaksana dengan baik.
2. Faktor Yang Menentukan Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun perlu peningkatan pada penyediaan sarana prasarana yang masih kurang memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan berbagai kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yakni sebagai berikut.

1. Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Dalam proses peningkatan layanan publik, hal penting yang perlu diperhatikan yakni pada peningkatan kemampuan daya tanggap dari pihak pemberi layanan sehingga diharapkan dapat beradaptasi dengan tugas-tugas baru.

2. Faktor Yang Menentukan Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini, pada pemerintah desa diharapkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sebagai penunjang berbagai pekerjaan pihak pemerintah desa sehingga pelayanan publik yang diberikan semakin membaik ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Taushia.
- Djafri, N. (2018). Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental). In *Idea Publishing*. Ideas Publishing.
- Hutapea, & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kaho, J. R. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Makarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Manulang, M. (2001). *Dasar- Dasar Manajemen*. Sinar Harapan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. UNPAD PRESS.
- Muhidin, S. A. (2009). *Konsep Efektivitas Pembelajaran*. Pustaka Setia.
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia.
- Niode, I. Y. (2014). Enterpreneurial Goverment Konsep dan Riset. In *UNG Press*.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. CV. Alfabeta.
- Priansa, D. J. (2017). *Manajemen Kinerja Kepegawaian Dalam Pengelolaan SDM Perusahaan*. CV Pustaka Setia.
- Pratikno. (2008). *Usulan Perubahan Kebijakan Penataaan Daerah : Pemekaran dan Penggabungan Daerah*.

- Purwanto, E. A., Tyastianti, D., Taufiq, A., & Novianto, W. (2017). "Pelayanan Publik" Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. In *Modul Pelayanan Publik*. Lembaga Administrasi Negara.
- Ratnawati, T. (2009). *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Pustaka Pelajar.
- Ruky, A. S. (2003). *Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, V. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. In *PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. PT Refika Aditam.
- Siswanto, S. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi*. PT Bumi Aksara.
- Soedjono, I. (2002). *Teknik memimpin Pegawai dan Pekerja*. Aksara Baru.
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media.
- Tarigan, Robinson. (2009). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ Press.
- Tjiptono, F. (2017). *Strategi Pemasaran*. Andi Offset.
- Widarta, I. (2005). *Cara Mudah Memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Pondok Edukasi.
- Yuniarsuh, T., & Suwatno. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.

Jurnal

- Japami, W., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 75–85. jmiap.ppj.unp.ac.id/jurnal
- Pantow, C., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2019). Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan

Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3).

Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaya, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 74–87. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/501>

Sudarsana. (2015). *Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik*. 10(1), 47–66.

Ticoalu, D. I., Kaawoan, J. E., & Lopian, M. T. (2017). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–13.

Yulianti, A. (2017). Efektivitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan Samarinda Kota di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5.

Waworuntu, C. (2017). *Efektivitas Pemekaran Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Desa Kolongan-Atas Kecamatan Sonder)*.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Mekarjaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti di Kecamatan Tapa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan ,
Penghapusan, Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.